ABSTRAK

Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Indonesia telah mengembangkan kebijakan yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum dan aspek keamanan, tetapi juga mulai memprioritaskan pendekatan kesehatan dalam penanganan masalah narkotika. Studi tentang tindakan rehabilitasi dan penghapusan pidana bagi pelaku narkotika memiliki relevansi penting dalam menilai sejauh mana aparat penegak hukum, khususnya hakim, menerapkan asas keadilan dan prinsip humanisme dalam perkara narkotika. Penelitian ini juga menjadi sarana untuk menilai urgensi penerapan rehabilitasi dan penghapusan pidana bagi pelaku narkotika di Pengadilan Negeri Jambi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi penegak hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan teori dan pendekatan undang-undang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan urgensi penerapan rehabilitasi dan penghapusan pidana bagi pelaku narkotika terletak pada pendekatan yang lebih manusiawi dan solutif dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan kondisi fisik dan mental pelaku agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Dalam menghadapi kendala kurangnya pemahaman terhadap perbedaan peran pelaku, terbatasnya lembaga rehabilitasi yang tersedia, serta belum optimalnya pelaksanaan asesmen terpadu yang menjadi dasar untuk menentukan kelayakan rehabilitasi, pemerintah dan lembaga peradilan telah melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan koordinasi antar-instansi terkait, memperkuat landasan regulasi, serta mengintensifkan sosialisasi kepada aparat penegak hukum. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat penerapan kebijakan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang bagi penyalahguna narkotika.

Kata Kunci: Tindakan Rehabilitasi, Penghapusan Pidana, Narkotika, Pengadilan Negeri Jambi

ABSTRACT

Since the implementation of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Indonesia has developed policies that not only focus on law enforcement and security aspects, but also begin to prioritize a health approach in handling narcotics problems. The study of rehabilitation and criminal erasure measures for narcotics offenders has important relevance in assessing the extent to which law enforcement officers, especially judges, apply the principles of justice and the principle of humanism in narcotics cases. This study is also a means to assess the urgency of implementing rehabilitation and criminal erasure for narcotics offenders at the Jambi District Court, so that it can be used as evaluation material for law enforcers. The method used in this study is an empirical legal research method with a theoretical approach and a statutory approach. Data collection in this study was carried out by interview. From the results of this study, it can be concluded that the urgency of implementing rehabilitation and criminal erasure for narcotics offenders lies in a more humane and solution-oriented approach in dealing with narcotics abuse. This approach does not only focus on punishment, but also on restoring the physical and mental condition of the perpetrator so that they can return to being part of society. In the face of obstacles such as lack of understanding of the differences in the roles of perpetrators, limited rehabilitation institutions available, and the less than optimal implementation of integrated assessments that are the basis for determining the suitability of rehabilitation, the government and judicial institutions have made various efforts such as improving coordination between related agencies, strengthening the regulatory basis, and intensifying socialization to law enforcement officers. These efforts are aimed at strengthening the implementation of legal policies that are not only firm, but also fair, humane, and oriented towards long-term recovery for drug abusers.

Keywords: Rehabilitation Action, Criminal Penalty Erasure, Narcotics, Jambi District Court